

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alfons, A.B. 2018. *Kajian Pengelolaan Lingkungan Pada Kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa*. Universitas Hasanudin, Makasar
- Auriga Nusantara, 2018. *Pengaturan Setengah Hati: Sebuah Studi tentang Izin Pemanfaatan Kayu oleh Masyarakat Adat di Tanah Papua*. Jakarta
- Andrew. B. Garner. 2009. *Black's Law Dictionary* (ninth edition). St. paul: West. California
- Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Dalimoenthe, 2023. *Pengantar Ilmu Pembangunan*. Bumi Aksara. Jakarta Timur,
- Gunanegara, 2019. *Reforma Agraria, Land Reform (+Bagi-Bagi Tanah) Pergulatan Konsepsi Dan Perjalanan Utopianisme*, PT. Tatanusa, Jakarta
- John Haba, 2010., *Realitas Masyarakat Adat Di Indonesia Sebuah Refleksi*, Iurnal Masyarakat & budaya Vlm.12
- Kuncoro. 2009. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*. UPP AMP YKPN. Bandung
- Marzuki, Peter Mahmud. 2020. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Prenada media Group, Jakarta
- Maria S.W. Sumardjono, 2008, *Tanah Dalam perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Nurcholis, H., 2016. *Konsep dan Teori Pembangunan*. Jakarta: Pustaka Pelajar, Jakarta
- Oloan Sitrus, 1995, *Pelepasan Atau Penyerahan Hak Sebagai Cara Pengadaan Tanah*. C.V Dasamedia Utama, Jakarta
- Ode Rahman dkk, 2021, *Analisis Pengaruh Rencana Pembangunan Proyek Prioritas Jalan Trans Papua (MP-31) terhadap Aspek Sosial-Ekologis Papua*. Walhi, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1998, *pengantar penelitian hukum*, UI Pres. Jakarta

Samudra, W., 2021. Otonomi Daerah. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, hlm. 43.

Supriyono, 2018, Keselamatan Lalulintas Jalan Raya, polinema press., Jakarta

Harjanti, 2011, Pengaruh Perkembangan Konsep Kepentingan Umum Terhadap Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia, risalah Hukum, vol.7.

Sitokdana, M. 2017. *IWOL Pusat Kehidupan Manusia Aplim Apom*. Satya Wacana Press. Salatiga

_____. 2017. *Mengenal Budaya Ngalum Ok*. Satya Wacana Press. Salatiga

Tjokroamidjojo, B., 2000. *Good governance. Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*. UI press. Jakarta

Tri Habib Adha. 2021. *Kerusakan lingkungan akibat pembangunan infrastruktur dalam karya seni grafis.*, FBS Universitas Negeri Padang, Indonesia, padang

Artikel Jurnal

Amnesty International. (2022, March 28). *Apa itu Free, Prior, and Informed Consent* <https://www.amnesty.id/apaitufreepriorandinformedconsent/>.

A. Rani, H., & Azlan, M. (2021). Dampak Pembangunan Jalan Tol Banda Aceh-Sigli Terhadap Lingkungan. *Tameh: Journal of Civil Engineering*, 9(1), 11–21. <https://doi.org/10.37598/tameh.v9i1.100>

Anwar Muda, A. (2016). *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Paket Pelebaran Jalan RTA Milono Palangkaraya*. *Media Ilmiah Teknik Lingkungan*, 1(1), 1–5. <https://doi.org/10.33084/mitl.v1i1.133>

A. Mas'adi, G. (n.d.). *Fiqih Muamalah Kontekstual*. PT. Raja Grafindo Persada.

A. Rani, H., & Azlan, M. (2021). Dampak Pembangunan Jalan Tol Banda Aceh-Sigli Terhadap Lingkungan. *Tameh: Journal of Civil Engineering*, 9(1), 11–21. <https://doi.org/10.37598/tameh.v9i1.100>

Alshikhi, & Abdullah. (2018). Information Quality: Definitions, Measurement, Dimensions, And Relationship With Decision Making. *European Journal of*

Business and Innovation Research, 6(5), 36–42. <http://e-journal.uajy.ac.id/14649/1/JURNAL.pdf>

Badan Pusat Statistika. (2021). *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2021*.

Badan Pusat Statistika. (2022a). *Distrik Ok Aon Dalam Angka 2022*.

Badan Pusat Statistika. (2022b). *Distrik Oksebang Dalam Angka 2022*.

Bappeda Pegunungan Bintang. (2021). *Laporan Akhir Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2018-2038*.

Dewan Kehutanan Nasional. (2011). *Rekomendasi Kebijakan: Instrumen Free, Prior Informed Consent (FPIC) Bagi Masyarakat Adat Dan Atau Masyarakat Lokal Yang Akan Terkena Dampak dalam Aktivitas REDD+ di Indonesia*.

Dewan Kehutanan Nasional. (2011). *Rekomendasi Kebijakan: Instrumen Free, Prior Informed Consent (FPIC) Bagi Masyarakat Adat Dan Atau Masyarakat Lokal Yang Akan Terkena Dampak dalam Aktivitas REDD+ di Indonesia*

Hetty Hasanah. (2012, June 1). *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*. [Http://Jurnal.Unikom.Ac.Id/Vol3/Perlindungan.Html](http://Jurnal.Unikom.Ac.Id/Vol3/Perlindungan.Html).

Josina Augusthina, “Pemenuhan Hak atas Air Bersih dan Sehat, Serta Hak Menggugat Masyarakat” *Balobe Law Journal*, vol.1. No.1 April, 2021

Kuncoro, E., & Mudjanarko, S. W. (2022). *Identifikasi Potensi Dampak Pembangunan Jalan Arfai Pami Terhadap Rtrw Kabupaten Manokwari*. *E-Jurnal Spirit Pro Patria*, 8(2), 89–100. <https://doi.org/10.29138/spirit.v8i2.2137>

Muazzin, M. 2014., *Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) atas Sumberdaya Alam: Perspektif Hukum Internasional*. Padjajaran, *Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*

Nababan, J., Rante, H., & Rusim, D. A. (2022). *Analisis Dampak Pembangunan Ruas Jalan Nasional Wamena-Mulia-Sinak*. *Jurnal ELIPS (Ekonomi, Lingkungan, Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Dan Sosial Budaya)*, 5(2), 45–55. <https://doi.org/10.31957/jurnalelips.v5i2.2398>

Sihotang, 2020, “BPJN Jayapura Kejar Pembangunan Ruas Jalan Lintas Perbatasan Ubrub - Towe Hitam-Oksibil”, [https:// Binamarga.Pu.go.id/balai-Jayapura](https://Binamarga.Pu.go.id/balai-Jayapura), diakses tanggal 26 Oktober 2023

Wikipedia, 2020, “hak atas air” https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_atas_air, Di Akses Pada Kamis 30 Mei 2020

Tim Penulis Pokja IV. 2011. “Panduan Pelaksanaan FPIC dalam Program UN-REDD di Sulawesi Tengah”. Palu: FAO, UNDP, UNEP.

Peraturan Perundang-undangan

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air

Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Undang-undang No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

Permen LH Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Ganti Rugi Akibat Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Perpres Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum

Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 36 Tahun
2005 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Deklarasi PBB Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat

Konvensi ILO No. 169 Tahun 1989 Tentang Masyarakat Hukum Adat

Komentar umum (*General Comment*) PBB Nomor 15

Konvensi internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya dalam Pasal 11 dan 12